

Transformasi Ekonomi Kreatif di Era Digital: Strategi dan Implementasi Pengembangan Unit Mikro Kecil dan Menengah

Okto Irianto¹, Ridho Sefrial Syahrul², Rifqi Aminudin Aziz³

irianto@unmus.ac.id¹, ridho.ss@kemenkeu.go.id², rifqi.aminudin@kemenkeu.go.id³

¹Universitas Musamus

^{2,3}Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke

Keywords: Youth Entrepreneurship, State Treasury Office, Musamus University, Institutional Collaboration

Abstract: Youth entrepreneurship development in Merauke requires synergy among various stakeholders, particularly between the State Treasury Office (KPPN) Merauke as a state financial management institution, and Musamus University as a higher education institution. This community service aims to identify effective collaboration patterns between the two institutions in building a sustainable youth entrepreneurship ecosystem. The method used is Focus Group Discussion (FGD) involving 10 KPPN Merauke employees and 5 Musamus University lecturers. The FGD resulted in three main collaborative programs: ANIM ISAI Digital Program for digital marketing training, SAMKAI Creative Hub for creative business incubation, and MSME financial mentoring program. The division of roles between KPPN as financial supervisor and Musamus University as technical advisor proved effective in designing programs that meet local needs. Key recommendations include establishing a joint coordination team, developing an integrated monitoring system, and preparing technical implementation guidelines. This program can potentially become a model for institutional collaboration in youth entrepreneurship development in the Papua region.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi digital dan bonus demografi yang dimiliki Merauke membuka peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan wirausaha muda. Sebagai kota strategis di Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea, Merauke memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif dan digital. Data BPS Kabupaten Merauke (2023) menunjukkan bahwa 60% penduduk Merauke berada pada usia produktif, dengan 35% di antaranya berusia 18–35 tahun. Namun, tingkat pengangguran di kalangan muda masih mencapai 15%, yang mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan potensi SDM yang ada.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke, sebagai institusi pengelola keuangan negara, memiliki peran strategis dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dan pengawasan dana program (KPPN Merauke). Di sisi lain, Universitas Musamus (UNMUS) sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di Merauke memiliki sumber daya dan kapasitas dalam pengembangan kewirausahaan melalui program

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Irianto & Asmaningrum, 2023). Sinergi antara KPPN Merauke dan UNMUS menjadi krusial mengingat kompleksitas tantangan dalam pengembangan wirausaha muda. Kolaborasi ini dapat memadukan keahlian pengawasan keuangan dari KPPN dengan kompetensi akademik dan teknis dari UNMUS. Namun, pola kolaborasi yang efektif antara kedua institusi ini masih perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memastikan terciptanya program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pengembangan wirausaha muda merupakan strategi kunci dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Generasi muda memiliki karakteristik unik yang mendukung keberhasilan kewirausahaan, seperti kemampuan adaptasi teknologi, kreativitas, dan keberanian mengambil risiko (Herbst et al., 2023; Sirajje et al., 2024). Lebih lanjut, Asmuruf et al. (2024) menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengembangan wirausaha muda yang mencakup aspek kapasitas teknis, manajerial, dan mental. Dalam konteks ekonomi digital, Barbe et al. (2003) dan Lachlan & Smith (2024) mengidentifikasi tiga faktor utama keberhasilan wirausaha muda: literasi digital, akses permodalan, dan pendampingan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Bernardus et al. (2024) yang menunjukkan bahwa 65% keberhasilan start-up di kawasan timur Indonesia ditentukan oleh kualitas pendampingan dan akses terhadap ekosistem pendukung.

KPPN sebagai lembaga keuangan negara memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian Arsana et al. (2018), Ibyzhanova et al. (2023), dan Noch & Rumasukun (2023) menunjukkan bahwa efektivitas program pemberdayaan UMKM meningkat ketika melibatkan pengawasan aktif dari lembaga keuangan negara. Sementara itu, Ehren et al., (2020) and Kinory & Canada (2020) menegaskan pentingnya sistem monitoring yang terintegrasi dalam pengelolaan dana program pemberdayaan. Model Triple Helix yang melibatkan akademisi, pemerintah, dan sektor bisnis telah terbukti efektif dalam pengembangan ekonomi lokal (Kinory & Canada, 2020; Schebesch et al., 2024). Attas et al. (2020) menganalisis keberhasilan implementasi Triple Helix di berbagai daerah Indonesia, dengan tingkat keberhasilan mencapai 75% ketika ada pembagian peran yang jelas antar stakeholder.

Dalam konteks Papua, (Sanuri, 2020) menemukan bahwa keberhasilan program pemberdayaan ekonomi sangat dipengaruhi oleh integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam implementasi *Triple Helix*. Hal ini memperkuat argumen pentingnya pendekatan kontekstual dalam pengembangan wirausaha. Studi kasus oleh (Asmuruf et al., 2024) tentang kolaborasi perguruan tinggi dan lembaga pemerintah di kawasan timur Indonesia menunjukkan beberapa faktor kunci keberhasilan:

- 1) Komitmen leadership dari kedua institusi
- 2) Sistem koordinasi yang terstruktur
- 3) Pembagian peran yang jelas
- 4) Mekanisme monitoring dan evaluasi bersama

Lebih spesifik untuk konteks Merauke, penelitian Irianto & Asmaningrum (2023) mengidentifikasi potensi kolaborasi institusi dalam pengembangan ekonomi kreatif, dengan *emphasis* pada pentingnya:

- 1) Pemahaman konteks lokal
- 2) Pelibatan tokoh adat
- 3) Integrasi teknologi digital
- 4) Pendekatan berbasis komunitas

Beberapa program pemberdayaan wirausaha yang telah berhasil diimplementasikan di berbagai daerah memberikan pembelajaran berharga. Diapepin et al. (2024) membangun kapasitas kewirausahaan mereka melalui program pelatihan yang didanai publik. Dengan menggunakan pendekatan penelitian aksi partisipatif, penilaian kebutuhan dilakukan terhadap 100 pemilik UMKM di Dharmasraya untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan pelatihan. Berdasarkan temuan tersebut, lokakarya dan sesi pendampingan dirancang dan disampaikan, dengan fokus pada literasi keuangan, strategi pemasaran, literasi digital, dan pengembangan rencana bisnis. Program pelatihan ini secara signifikan meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep bisnis utama, termasuk manajemen keuangan, pemasaran, dan perangkat digital. Peserta juga menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam mengelola dan mengembangkan bisnis mereka. Program ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan pembelajaran antar-pemilik UMKM.

Sementara itu, dalam konteks Kota Peureulak, pemberdayaan ekonomi masyarakat dilaksanakan melalui program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha yang diselenggarakan oleh BSI Link (Wani et al., 2023). Peserta program memperoleh pengetahuan tentang dasar-dasar usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan strategi pengembangan usaha. Hasil kegiatan program pelatihan ini antara lain adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, penyusunan rencana usaha yang solid, peningkatan kemandirian ekonomi, peningkatan daya saing usaha, penciptaan lapangan kerja, kolaborasi dan jaringan usaha, serta dampak terhadap pembangunan berkelanjutan.

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk:

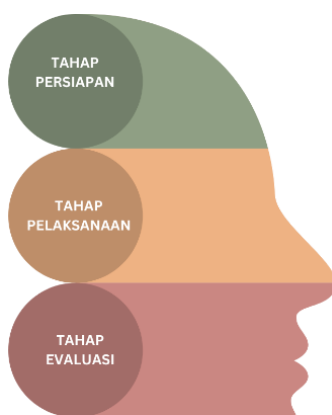
- 1) Mengidentifikasi pola kolaborasi efektif antara KPPN Merauke dan UNMUS dalam membangun ekosistem wirausaha muda
- 2) Merancang program-program kolaboratif yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal
- 3) Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi program yang terintegrasi
- 4) Mengembangkan model kolaborasi institusi yang dapat direplikasi di daerah lain

Urgensi program ini semakin relevan mengingat tren global yang mengarah pada ekonomi digital dan kreatif. Merauke, dengan posisi strategisnya, memiliki potensi menjadi hub ekonomi kreatif di wilayah Papua yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan

berkelanjutan.

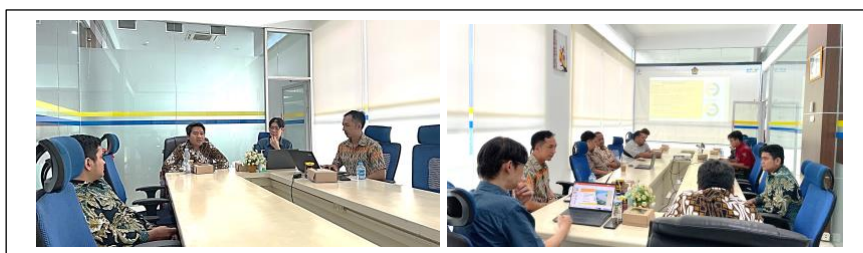
Metode

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2024 di Aula KPPN Merauke. Kegiatan ini melibatkan 10 pegawai KPPN Merauke yang terdiri dari berbagai seksi dan 5 dosen Universitas Musamus dari Fakultas Ekonomi. Pemilihan peserta dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan relevansi tugas dan kompetensi dalam pengembangan wirausaha muda. Pelaksanaan FGD dibagi dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi (Ambarwati et al., 2022) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahap Pelaksanaan FGD

Tahap persiapan mencakup koordinasi awal antara tim pengabdian UNMUS dengan pimpinan KPPN Merauke, penyusunan materi presentasi, dan penyiapan instrumen diskusi. Materi yang dipersiapkan meliputi program pengembangan wirausaha berbasis kearifan lokal, mekanisme pengawasan keuangan, dan model kolaborasi institusi. Tahap pelaksanaan FGD diawali dengan presentasi tim pengabdian tentang "Pengembangan SDM dan Wirausaha Muda di Merauke", dilanjutkan dengan sesi diskusi terarah. Diskusi difasilitasi oleh moderator yang membagi peserta ke dalam tiga kelompok fokus: pengembangan program, mekanisme pengawasan, dan sistem monitoring. Setiap kelompok dipandu dengan daftar pertanyaan terstruktur untuk menggali ide dan masukan dari peserta. Pelaksanaan kegiatan FGD ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan FGD KPPN-UNMUS

Tahap evaluasi dilakukan melalui analisis hasil diskusi yang dicatat dalam bentuk notulensi dan rekaman audio. Tim pengabdian melakukan kategorisasi dan sintesis terhadap masukan peserta untuk menghasilkan rekomendasi program yang aplikatif. Evaluasi juga mencakup pengisian kuesioner oleh peserta untuk menilai efektivitas FGD dan mengidentifikasi area perbaikan. Untuk memastikan validitas hasil, tim pengabdian menerapkan teknik triangulasi data dengan membandingkan hasil diskusi kelompok, masukan individual, dan dokumentasi kegiatan. Hasil FGD kemudian divalidasi melalui konsultasi dengan pimpinan kedua institusi untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan kapasitas organisasi. Pendekatan partisipatif dalam FGD ini memungkinkan terciptanya rasa kepemilikan program dari kedua institusi, sekaligus membangun pemahaman bersama tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengembangan wirausaha muda di Merauke.

Pembahasan

Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 15 peserta dari KPPN Merauke dan Universitas Musamus telah menghasilkan beberapa terobosan penting dalam pengembangan wirausaha muda di Merauke. Keragaman latar belakang peserta yang terdiri dari berbagai seksi KPPN dan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNMUS memberikan perspektif yang komprehensif dalam diskusi. Hasil FGD mengidentifikasi tiga program kolaboratif utama yang potensial untuk dikembangkan. Program pertama adalah ANIM ISAI Digital Program yang mendapat respons sangat positif dari 85% peserta. Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan digital marketing dan e-commerce, disertai pendampingan manajemen keuangan digital dan sistem monitoring berbasis aplikasi (Gambar 3). Target ambisius ditetapkan untuk mencetak 100 wirausaha muda dalam satu tahun pertama implementasi.



Gambar 3. ANIM ISAI Digital Program

Inisiatif kedua yang mendapat dukungan penuh adalah pembentukan SAMKAI *Creative*

Hub. Fasilitas yang direncanakan akan berlokasi di kawasan kampus UNMUS ini akan dilengkapi dengan *co-working space* dan studio produksi. Program mentoring reguler dan kerjasama dengan pelaku industri kreatif menjadi komponen penting dalam pengembangan hub ini. Peserta FGD menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dalam setiap aktivitas *creative hub*. Program prioritas SAMKAI *Creative Hub* ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Program Unggulan SAMKAI *Creative Hub*

Program ketiga fokus pada pendampingan keuangan yang merupakan hasil sinergi keahlian KPPN dan UNMUS. Program ini mencakup pelatihan literasi keuangan digital, pendampingan penyusunan laporan keuangan, fasilitasi akses ke pembiayaan formal, dan monitoring berkala (Gambar 5). Peserta FGD menyepakati pentingnya standarisasi format pelaporan dan pengembangan sistem monitoring terintegrasi.



Gambar 5. Program Pendampingan Keuangan

Pembagian peran antar institusi juga dirumuskan dengan jelas dalam FGD. KPPN akan fokus pada aspek pengawasan penggunaan anggaran, verifikasi laporan keuangan, koordinasi

dengan bank penyalur, dan evaluasi efektivitas program. Sementara UNMUS berperan dalam penyediaan kurikulum dan modul pelatihan, pendampingan teknis wirausaha, riset pengembangan program, dan fasilitasi *networking* dengan industri. Diskusi juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan infrastruktur digital, gap kompetensi SDM, dan potensi hambatan koordinasi antar institusi. Untuk mengatasinya, peserta FGD mengusulkan beberapa solusi strategis seperti kerjasama dengan provider telekomunikasi, program *training of trainers*, dan pembentukan tim koordinasi khusus.

Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung setelah pemaparan materi, beberapa peserta FGD mengajukan pertanyaan seputar strategi implementasi transformasi digital UMKM di Merauke. Salah satu peserta mengajukan pertanyaan tentang kendala infrastruktur telekomunikasi yang masih terbatas di beberapa wilayah. Menanggapi hal tersebut, pemateri menjelaskan pentingnya kerjasama strategis dengan provider telekomunikasi untuk membangun infrastruktur yang lebih merata dan menyediakan paket data khusus UMKM dengan harga terjangkau.

Pertanyaan berikutnya mempertanyakan strategi peningkatan kapasitas digital pelaku UMKM. Pemateri mengusulkan program *Training of Trainers* (ToT) sebagai solusi yang efektif. Melalui program ini, akan dibentuk kelompok pelatih lokal yang memahami karakteristik UMKM Merauke. Para *trainer* akan dibekali dengan kurikulum komprehensif mencakup literasi digital, pemasaran online, manajemen keuangan digital, dan penggunaan *marketplace*. Sistem *cascade training* akan memungkinkan penyebaran pengetahuan yang lebih luas ke seluruh pelaku UMKM.

Peserta lainnya mengangkat isu koordinasi antar pemangku kepentingan. Merespons hal ini, pemateri menekankan urgensi pembentukan tim koordinasi khusus yang melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas digital. Tim ini akan berperan sebagai hub yang menyelaraskan berbagai program pengembangan UMKM digital serta melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program secara berkelanjutan. Diskusi berlanjut dengan pertanyaan tentang tahapan implementasi program. Pemateri menguraikan pentingnya dimulai dengan pemetaan detail kebutuhan, meliputi survei infrastruktur digital, analisis kesenjangan kompetensi, dan identifikasi potensi pasar digital. Selanjutnya perlu ditetapkan prioritas dan timeline yang jelas, termasuk *quick wins* yang bisa segera diimplementasikan. Penguatan kolaborasi melalui MoU dengan berbagai pihak dan sistem monitoring evaluasi yang terukur juga menjadi bagian penting dalam implementasi program.

Sesi tanya jawab ditutup dengan pertanyaan tentang keberlanjutan program. Pemateri menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital UMKM di Merauke akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Sistem monitoring dan evaluasi yang baik akan memungkinkan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang muncul di lapangan. Evaluasi menyeluruh terhadap hasil FGD menunjukkan bahwa program kolaboratif ini memiliki potensi besar untuk mendorong

pertumbuhan wirausaha muda di Merauke. Keunggulan utama program terletak pada integrasinya dengan nilai-nilai lokal, sistem monitoring yang terintegrasi, dan pendekatan yang komprehensif. Namun, beberapa area masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam hal sistem dokumentasi, standardisasi prosedur monitoring, dan pengembangan aplikasi monitoring.

Berdasarkan hasil evaluasi, peran *stakeholders* dalam pengembangan sistem monitoring UMKM di Merauke terintegrasi dalam tiga aspek utama. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM mengkoordinasi sistem dokumentasi terstandar, mencakup profil UMKM, perkembangan usaha, dan capaian program pendampingan yang dapat diakses dan diperbarui secara *real-time*. Perguruan tinggi dan lembaga riset berkontribusi dalam standardisasi prosedur monitoring dengan mengembangkan metodologi dan indikator terukur. Mereka membantu merumuskan SOP dan instrumen pengumpulan data yang valid untuk menghasilkan rekomendasi berbasis bukti.

Pengembangan aplikasi monitoring melibatkan kolaborasi komunitas teknologi lokal, startup digital, dan provider telekomunikasi dalam membangun platform yang user-friendly. Asosiasi UMKM berperan memberikan masukan dan feedback, sementara lembaga pendampingan membantu sosialisasi dan pelatihan. Tim koordinasi khusus mengawasi keseluruhan proses, memastikan sistem berjalan selaras dan melakukan evaluasi berkala berdasarkan kebutuhan lapangan. Dampak yang diharapkan dari implementasi program ini meliputi peningkatan signifikan jumlah wirausaha muda, pertumbuhan ekonomi digital, penguatan ekonomi kreatif, dan penurunan tingkat pengangguran di kalangan muda Merauke. Untuk memastikan keberlanjutan program, peserta FGD merekomendasikan pendekatan bertahap dalam implementasi, mulai dari pembentukan tim koordinasi dan penyusunan SOP dalam jangka pendek, hingga *scaling up* program dan pengembangan model bisnis dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Focus Group Discussion antara KPPN Merauke dan Universitas Musamus telah menghasilkan kerangka kolaborasi yang jelas dalam pengembangan wirausaha muda di Merauke. Sinergi kedua institusi ini menunjukkan potensi besar dalam menciptakan ekosistem wirausaha yang berkelanjutan, dengan memadukan keahlian pengawasan keuangan dari KPPN dan kapasitas akademik dari UNMUS. ANIM ISAI Digital Program, SAMKAI *Creative Hub*, dan pendampingan keuangan yang dihasilkan dari FGD mencerminkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan kebutuhan pengembangan ekonomi digital.

Keberhasilan implementasi program akan sangat bergantung pada komitmen berkelanjutan dari kedua institusi dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Pembagian peran yang jelas antara KPPN sebagai pengawas keuangan dan UNMUS sebagai

pendamping teknis memberikan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan program. Sistem monitoring terintegrasi yang diusulkan dalam FGD memungkinkan evaluasi dan perbaikan program secara berkesinambungan.

Berdasarkan hasil FGD, beberapa rekomendasi kunci diajukan untuk optimalisasi program. Pertama, pembentukan tim koordinasi bersama yang beranggotakan perwakilan KPPN dan UNMUS perlu segera direalisasikan untuk memastikan kelancaran implementasi program. Kedua, pengembangan sistem informasi terintegrasi berbasis digital menjadi prioritas untuk mendukung monitoring dan evaluasi program. Ketiga, penguatan kapasitas SDM kedua institusi melalui program pelatihan bersama perlu dijadwalkan secara reguler.

Dalam aspek teknis, direkomendasikan penyusunan standar operasional prosedur yang detail untuk setiap program, termasuk mekanisme pengawasan, pelaporan, dan evaluasi. Kerjasama dengan pihak ketiga, seperti provider telekomunikasi dan lembaga keuangan, perlu diinisiasi untuk mengatasi kendala infrastruktur dan akses modal. Pengembangan aplikasi monitoring berbasis mobile juga direkomendasikan untuk memudahkan pendampingan dan pengawasan program.

Implementasi program sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dengan *pilot project* yang melibatkan kelompok terbatas wirausaha muda. Hasil evaluasi dari *pilot project* ini akan menjadi dasar untuk penyempurnaan program sebelum diterapkan dalam skala yang lebih luas. Dokumentasi *best practices* dan *lessons learned* dari setiap tahap implementasi perlu dilakukan secara sistematis untuk memudahkan replikasi program di daerah lain.

Kesuksesan program ini akan menjadi model kolaborasi institusi dalam pengembangan wirausaha muda di wilayah Papua, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital dan kreatif di Merauke. Komitmen jangka panjang, fleksibilitas dalam adaptasi program, dan komunikasi intensif antar institusi menjadi kunci keberhasilan implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada KPPN Merauke yang telah berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan program pengabdian masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, D., Joni, J., Buhari, I., Putri, D. A., & Sari, D. I. (2022). Pemetaan Peluang Dan Tantangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Focus Group Discussion (Fgd) Di Desa Kesamben, Kabupaten Malang. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 6(02), 53–62. <https://doi.org/10.22219/skie.v6i02.22334>
- Arsana, I. M. M., Sugiyarta, I. N., & Dicriyani, N. L. G. M. (2018). Effectiveness of Supervision Model as the Key to Increase the Performance of Supervision of the Village Financial

- Institution. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.96>
- Asmuruf, Cellindion. F. S., Permatasari, A., Siahaan, S., Malagam, F. N., & Muskita, S. M. W. (2024). Membangun Jiwa Pebisnis Melalui Kreasi Rumah Honai Di Kalangan Remaja HBM. *Jurnal Kewirausahaan Cerdas Dan Digital*, 1(4), 01–10. <https://doi.org/10.61132/jukerdi.v1i4.261>
- Attas, A., Risal, M., & Aqsa, M. (2020). The Role of Government, Academia, and Private Sector Using Triple Helix Approach in Tourism Development in East Luwu Regency. *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD 2020)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.018>
- Barbe, D. F., Magids, S. A., & Thornton, K. S. (2003). Holistic approach for technology entrepreneurship education in engineering. *33rd Annual Frontiers in Education, 2003. FIE 2003.*, T2D_1–T2D_6. <https://doi.org/10.1109/FIE.2003.1263299>
- Bernardus, D., Arisa, M. F., Sufa, S. A., & Suparwata, D. O. (2024). Supporting Start-ups in Indonesia: Examining Government Policies, Incubator Business, and Sustainable Structure for Entrepreneurial Ecosystems and Capital. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(1), 236–259. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.372>
- BPS Kabupaten Merauke. (2023). *Kabupaten Merauke Dalam Angka 2023*.
- Diapopin, M., Febrina, D. I., Sunaryo, J., Astika, Y. W., Elsyra, N., Wismar, T., & Hamirul. (2024). Building Entrepreneurial Capacity: The Role of Publicly Funded Training Programs in Empowering MSMEs in Dharmasraya, Indonesia. *Indonesian Community Empowerment Journal*, 4(2), 211–226. <https://doi.org/10.37275/icejournal.v4i2.61>
- Ehren, M., Paterson, A., & Baxter, J. (2020). Accountability and trust: Two sides of the same coin? *Journal of Educational Change*, 21(1), 183–213. <https://doi.org/10.1007/s10833-019-09352-4>
- Herbst, C. Z., Coelho, Z. L., & Zainal, D. Z. (2023). Innovation and Creativity among the Youths and Entrepreneurial Success: A Case Study of Youth Owned Enterprises in Hangzhou, China. *Journal of Entrepreneurship and Project Management*, 7(13), 14–21. <https://doi.org/10.53819/81018102t5264>
- Ibyzhanova, A., Rustenova, E., Sultanova, Z., Talapbayeva, G., & Yerniyazova, Z. (2023). Evaluation of the effectiveness of government support for technology entrepreneurship. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5(13 (125)), 36–46. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.286390>
- Irianto, O., & Asmaningrum, H. P. (2023). Peran Institusi Pendidikan Tinggi dalam Pengembangan Kapasitas Ekonomi Kampung. *Prosiding Seminar Nasional Sinergi, Riset, Dan Inovasi*, 1(1), 91–99.
- Kinory, E., & Canada, J. (2020). The Impact of Mutual Monitoring and Enterprise System Integration on the Empowerment of Managers. *International Journal of Enterprise Information Systems*, 16(2), 1–21. <https://doi.org/10.4018/IJEIS.2020040101>
- KPPN Merauke. (n.d.). *Tugas dan Fungsi KPPN Tipe A1 Merauke*. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Merauke/Id/Profil/Tugasdanfungsi.Html>
- Lachlan, N., & Smith, O. (2024). Determining Factors for Startup Success in Indonesia: Perspective of Young Entrepreneurs. *Startuppreneur Business Digital (SABDA Journal)*, 3(2), 115–122. <https://doi.org/10.33050/sabda.v3i2.632>
- Noch, M. Y., & Rumasukun, M. R. (2023). Sustainable Development from Within: Empowering Communities through Financial Empowerment and SME Support. *Golden Ratio of Community Services and Dedication*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.52970/grcsd.v3i1.604>
- Sanuri, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Dengan Pendekatan Outcome Mapping. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 7(2), 101–114. <https://doi.org/10.21831/jppm.v7i2.24870>
- Schebesch, K. B., Şoim, H. F., & Blaga, R. L. (2024). The triple-helix model as foundation of innovative entrepreneurial ecosystems. *Journal of Ethics in Entrepreneurship and Technology*, 4(2), 104–129. <https://doi.org/10.1108/JEET-08-2024-0026>
- Sirajje, Y., Abaho, E., Nsereko, I., Basalirwa, E. M., Muhammed, N., & Balunywa, J. W. (2024). Generational persona and entrepreneurial behavior among millennial entrepreneurs:

- the mediating role of adaptability tendencies. *Management Matters*, 21(2), 143–163. <https://doi.org/10.1108/MANM-02-2024-0010>
- Wani, C. E., Ismail, & Zubaili. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan BSI Link. *PASAI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 42–46. <https://doi.org/10.58477/pasai.v2i1.94>

